

TESIS

**PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN MELALUI KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ASSET INVENTORY ON THE QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENTS THROUGH THE QUALITY OF
INFORMATION TECHNOLOGY AS A MODERATING VARIABLE***

**A. FADIL PRATAMA
A042211012**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN MELALUI KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ASSET INVENTORY ON THE QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENTS THROUGH THE QUALITY OF
INFORMATION TECHNOLOGY AS A MODERATING VARIABLE***

sebagai persyaratan memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

**A. FADIL PRATAMA
A042211012**



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

PENGARUH INVENTARISASI ASET TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN MELALUI KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

A. FADIL FRATAMA
A042221012

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 06 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196406091992031000



Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Fadil Fratama**

NIM : **A042221012**

Program Studi : Magister Keuangan Daerah S2

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Kualitas Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengembalian tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2024

Yang menyatakan



A. Fadil Fratama

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku dosen pembimbing utama yang selalu menyediakan waktunya kapanpun untuk memberikan arahan, membantu peneliti dari awal hingga akhir dan mendengarkan curhatan penulis;

Ibu Prof. Dr. Nirwana, SE.,M.Si.,CA selaku pembimbing pendamping yang sangat baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar;

Para penguji Ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA dan Ibu Prof. Dr. Nuraeni Kadir, SE., M.Si, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat

berharga pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis hingga sidang tutup;

Pemerintah Kota Makassar atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan;

Kedua Orang tua tercinta yang telah memberikan restu dan izin agar penulis bisa melanjutkan pendidikan, selalu mendukung dan mendampingi penulis atas kendala-kendala yang dihadapi selama ini;

Teriring doa penulis panjatkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis semoga diberikan kesehatan, kehidupan yang barokah serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, Januari 2024

Penulis

ABSTRAK

A. FADIL PRATAMA. *Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Kualitas Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Arifuddin dan Nirwana).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan dan pengaruh inventarisasi aset yang dimoderasi oleh kualitas teknologi informasi terhadap laporan keuangan pada pemerintah Kota Makassar. Responden sebanyak 92 orang dari berbagai dinas dan instansi pemerintahan di Kota Makassar. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data diolah menggunakan software IBM SPSS dan melakukan beberapa pengujian terhadap kualitas data. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) yang pada pengaplikasiannya dilakukan dua kali regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang digunakan seluruhnya memiliki keabsahan dan memenuhi standar dari asumsi klasik. Adapun hasil penelitian setiap variabel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai taraf signifikansi 5%. Selain itu, untuk variabel moderasi kualitas laporan keuangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan sebagai penguat dari inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan dengan taraf signifikansi 5%.

Kata kunci: inventarisasi aset, kualitas teknologi informasi, kualitas laporan keuangan



ABSTRACT

A. FADIL PRATAMA. *The Effect of Asset Inventory on the Quality of Financial Statements Through the Quality of Information Technology as a Moderating Variable* (supervised by Arifuddin and Nirwana)

This study aims to test and analyze the effect of asset inventory on the quality of financial statements, as well as the effect of asset inventory moderated by the quality of information technology on financial reports in the government of Makassar City. Respondents who participated in the research conducted were 92 people coming from various government offices and agencies in Makassar City determined using purposive sampling technique. This study used a questionnaire to input data, i.e. primary data processed using IBM SPSS software and conducted several tests of data quality. The method used was Multiple Linear Regression Analysis and MRA or (Moderated Regression Analysis), which used twice regressions in their applications. The results show that the data used in this study all have validity and meet the standards of classical assumptions. The research results of each variable show that there is a positive and significant effect between asset inventory and the quality of financial statements with a significance level value of 5%. In addition, the moderating variable for the quality of financial statements also has a positive and significant effect as an amplifier of asset inventory on the quality of financial statements with a significant level of 5%.

Keywords: asset inventory, information technology quality, financial statement quality



DAFTAR ISI

TESIS	i
TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Sitematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Stewardship	12
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan	14
2.1.3 Inventarisasi Aset	18
2.1.4 Teknologi Informasi	21
2.2 Tinjauan Empiris atau Penelitian Terdahulu	23
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN	28
3.1. Kerangka Pemikiran	28
3.2. Pengembangan Hipotesis	30
3.2.1 Hubungan Inventarisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	30
3.2.2 Hubungan Inventarisasi Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kualitas Teknologi Informasi sebagai variable moderasi	31
BAB IV METODE PENELITIAN	32
4.1 Rancangan Penelitian	32
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian	32
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	32
4.4 Jenis dan Sumber Data	35
4.5 Metode Pengumpulan Data	35
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
4.6.1 Variabel Independen	36

4.6.2	Variabel Moderating	36
4.6.3	Variabel Dependen	37
4.7	Instrumen Penelitian	38
4.8	Teknik Analisis Data	38
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN	43
5.1	Deskripsi Data	43
5.1.1	Karakteristik Responden	45
5.1.2	Deskripsi Data Sampel	47
5.2	Deskripsi Hasil Penelitian	49
5.2.1	Uji Kualitas Data	49
5.2.2	Uji Asumsi Klasik	51
5.2.3	Hasil Uji Hipotesis	55
5.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
5.4	Hasil Uji Statistik Simultan (F test)	59
5.5	Hasil Uji Pembahasan	60
5.5.1	Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan	60
5.5.2	Pengaruh Inventarisasi Aset yang di moderisasi oleh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	62
BAB VI	PENUTUP	64
6.1	Kesimpulan	64
6.2	Implikasi Penelitian	65
6.3	Keterbatasan	65
6.4	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Opini Laporan Keuangan Kota Makassar	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian kuesioner	43
Tabel 5. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	45
Tabel 5. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 5. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Dinas	47
Tabel 5. 6 Deskripsi Statistik	48
Tabel 5. 7 Hasil Uji Validitas Data	50
Tabel 5. 8 Hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 5. 9 Hasil Uji Normalitas Data	52
Tabel 5. 10 Hasil Uji Multikolinieritas	55
Tabel 5. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	55
Tabel 5. 12 Hasil Uji Regresi Moderasi	56
Tabel 5. 13 Hasil Uji Hipotesis	57
Tabel 5. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 5. 15 Uji Simultan (Uji F)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
Gambar 5. 1 Grafik Histogram Uji Normalitas	53
Gambar 5. 2 Uji Heteroskedastisitas	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam tata Kelola pemerintah yang baik atau sering disebut dengan *Good Governance*, dalam hal ini menjadi permintaan masyarakat untuk mewujudkan sistem pengelolaan kekayaan daerah yang efektif serta efisien dengan memperhatikan struktur-struktur dalam laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Penyajian laporan keuangan daerah mampu menyediakan penjelasan yang relevan secara transparan dan akuntabel serta jujur kepada masyarakat sesuai Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tujuan dalam penyajian informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan kinerja keuangan, posisi keuangan, realisasi anggaran guna penyusunan dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan dana.

Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk membuat dan mempresentasikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. **Informasi yang relevan** memiliki

indicator yaitu: (1) memiliki tujuan umpan balik untuk menegaskan dan mengoreksi ekspektasi sebelumnya, (2) memiliki manfaat prediktif untuk memperkirakan masa yang akan datang berdasarkan hasil sebelumnya, (3) tepat waktu dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, dan (4) lengkap dengan maksud petunjuk akuntansi keuangan pemerintah disampaikan selengkap mungkin.

Andal merupakan informasi dalam laporan keuangan yang dapat diandalkan didefinisikan sebagai informasi yang jujur dan dapat diandalkan yang menyajikan fakta yang akurat. Namun, jika informasi tersebut tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan. Adapun karakteristik dari informasi yang andal: (1) penyampaian yang jujur dengan transaksi dan peristiwa lainnya untuk disajikan dengan wajar; (2) diverifikasi dan hasilnya konsisten, bahkan jika pengujian dilakukan oleh beberapa pihak lebih dari satu kali; dan (3) netralitas yang dimaksud pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. (Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010).

Dapat dibandingkan yaitu Laporan keuangan akan bermanfaat daripada laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, perbandingan internal dapat dilakukan. Jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda, perbandingan eksternal dapat dilakukan. (Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010)

Dapat dipahami yaitu Laporan keuangan memiliki informasi yang dipahami oleh pengguna dan ditulis dengan bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna. (Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010)

Good Governance dapat dilihat dari kualitas laporan keuangannya dengan menggunakan pengembangan paradigma serta prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Adapun salah satu aspek penilaian kualitas laporan keuangan ialah penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sehingga diyakini pula laporan keuangan disusun dan disampaikan sesuai aturan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Hasil Penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbagi atas 4 yaitu, Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) merupakan opini auditor tanpa suatu kesalahan yang material yang disampaikan secara real dan wajar dari laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku, Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) merupakan opini auditor yang disampaikan secara real dan wajar sesuai aturan yang berlaku, kecuali untuk hasil yang berhubungan dengan yang dikecualikan, Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*) merupakan opini auditor jika terjadi laporan keuangan tidak disampaikan secara real dan wajar yang sesuai dengan ketentuan berlaku, dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*), auditor tidak menyampaikan pendapat yang disebabkan oleh laporan keuangan yang

disampaikan tidak terkait pada aturan yang berlaku dipengaruhi oleh pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, dan auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. (Laporan Kinerja Badan Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2022)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah akan mempengaruhi integritas pemerintah tersebut dengan menunjukkan bahwa laporan yang disediakan untuk disampaikan secara wajar dan berkualitas. Sehingga setiap pemerintah menargetkan laporan keuangan yang disampaikan ke publik telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI, sehingga tingkat kepercayaan atas laporan akan meningkat serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau penyusunan anggaran pada tahun akan datang.

Indikator penilaian BPK RI memberikan opini WTP ialah laporan yang telah disajikan sesuai poin-poin pada standar akuntansi pemerintah. Wajar tanpa pengecualian bukan berarti kebenaran mutlak atas suatu transaksi, melainkan kewajaran pada laporan keuangan secara material atau signifikan. Dapat dilihat opini yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir ialah (Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar)

Tabel 1. 1 Opini Laporan Keuangan Kota Makassar

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Data diolah (2024)

Pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir Opini yang diberikan oleh BPK RI ialah secara Wajar Tanpa Pengecualian kecuali ditahun 2020 Pemerintah Kota Makassar opini yang diberikan ialah Wajar dengan Pengecualian. Sedangkan pada tahun 2022 Kota Makassar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI namun masih ada masalah pada nilai aset tanah sebesar 29.782.331.000, hal ini disebabkan oleh proses persertifikatan beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Makassar yang belum rampung. (Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2022).

Hasil Penelitian Abidin (2021), menunjukkan bahwa Inventarisasi Aset berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa adanya inventarisasi aset akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Adapun hasil penelitian Sukmawati (2021) dan Ruda (2023) yang menyatakan bahwa Inventarisasi Aset berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Andini dkk (2017) menemukan bahwa inventaris aset tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian Sandeo (2018) menegaskan bahwa inventaris aset memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun

tidak signifikan. Namun dengan adanya gap hasil penelitian-penelitian tersebut, diduga memiliki faktor lain yang dapat memengaruhi pengaruh inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan. Selain Inventarisasi Aset, Kualitas Laporan Keuangan juga kemungkinan akan dipengaruhi oleh Kualitas Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengatur teknologi informasi pemerintah daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 memberikan penguatan tambahan. Peraturan ini mengatur bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan SIKD Nasional dan Daerah. Dengan adanya hal seperti ini berarti akan memudahkan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah terkhususnya pada aspek inventarisasi aset. Pemanfaatan Teknologi Informasi akan lebih mudah dilaksanakan, efektif, dan efisien dalam mendukung LKPD yang berkualitas.

Pemerintah Kota Makassar menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah (Simbakda) yang merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menunjang kinerja aparat pemerintah dalam mengelola barang dan kekayaan daerah dengan tujuan adanya pengelolaan barang yang lengkap, akurat, dan mudah untuk diakses. Namun pada rencana kerja BPKAD Tahun 2023, pemanfaatan teknologi Informasi termasuk kelemahan dari faktor internal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi, dengan indikasi pernyataan “belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah”. (Rencana

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2023).

Kualitas Teknologi Informasi terbagi atas beberapa indikator ialah pengelolah data, pengolahan informasi, serta proses yang bersifat elektronik yang memberikan pelayanan kepada publik dalam mengakses informasi keuangan. Teknologi Informasi dalam bidang keuangan berfungsi untuk membantu organisasi atau Lembaga dalam ketepatanwaktu dalam menyampaikan hasil laporan keuangan serta dapat menghindari hal buruk yang akan terjadi jika kemungkinan akan kehilangan data laporan keuangan. Hasil penelitian Hadis (2022) dan Ayem (2023) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pernyataan ini juga didukung oleh Mene (2018) yang menunjukkan hasil penelitiannya yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asriani (2018) yang mengemukakan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah (SIMBAKDA) terutama pada kualitas, kepuasan pengguna, dan penggunaan sistem terdapat hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan publik dengan indikator pada pengelolaan dan pelaporan asset. Wahyuni (2017) menjelaskan hal ini dengan mengatakan organisasi perangkat daerah harus memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan operasional karena memungkinkan orang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara publik yang jelas dan akurat. Terwujudnya inventarisasi aset yang handal

membutuhkan sinkronisasi dari kualitas teknologi informasi sekaligus berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa barang yang dibeli atau diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan yang sah lainnya dianggap sebagai barang milik daerah. Sedang Penatausahaan mencakup berbagai tindakan seperti pembukuan, menyimpan inventaris, dan melaporkan barang milik negara atau daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 menyatakan bahwa "Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencacatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara." Adapun objek Inventarisasi Barang Milik Negara meliputi yaitu persediaan; tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; aset tetap lainnya; aset tidak terwujud dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah (tanah dan/atau bangunan) yang berada dalam penguasaannya. Inventarisasi tersebut harus dilakukan paling sedikit dalam 1 tahun dan harus dilakukan paling sedikit dalam 5 tahun. Pada kegiatan Inventarisasi memiliki tahapan yang terdiri dari:

- a) Tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim inventarisasi dan persiapan data awal;
- b) Tahap pelaksanaan;
- c) Tahap pelaporan hasil inventarisasi; dan

d) Tindak lanjut hasil inventarisasi yang terdiri dari beberapa indikator ialah pemberian label pada; reklasifikasi; koreksi; pencatatan; pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara; penghapusan; menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya tahapan inventarisasi asset yang merupakan asset milik daerah yang diatur secara resmi oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi terutama dalam pembuatan laporan. Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Abidin (2021) menyatakan bahwa alur kerja sistematis membuat laporan keuangan dapat dipercaya oleh orang-orang yang membacanya. Selain itu, kecepatan penggunaan teknologi informasi berdampak pada seberapa efektif penerapan Sistem Informasi Akuntansi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah proses inventarisasi aset berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar?
2. Apakah ada pengaruh Kualitas Teknologi Informasi memoderasi Inventarisasi Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh proses inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar
2. Menganalisis kualitas Teknologi Informasi sebagai variable yang memoderasi pengaruh inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis ialah sebagai proses menambah ilmu serta pengetahuan dan informasi mengenai inventarisasi aset yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan kualitas teknologi informasi sebagai variabel moderasi di Kota Makassar.
2. Bagi pemerintah ialah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan informasi dalam hal inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan dengan peningkatan informasi keuangan daerah.
3. Bagi pihak lain yaitu sebagai rujukan, referensi dan masukan, perbandingan, serta tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai inventarisasi aset, kualitas teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan.

1.5. Sitematika Penulisan

Penulisan yang metodis ini dimaksudkan untuk menghasilkan alur

informasi yang logis sebagaimana yang disampaikan. Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri atas halaman-halaman berikut: Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II terdapat Tinjauan Pustaka, dengan menguraikan tinjauan teori, gagasan, dan penelitian empiris semuanya dituangkan dalam bab ini. Teori yang menjadi landasan proses penelitian dibahas dalam bab ini. Peneliti menyelidikinya dengan menggunakan berbagai sumber, termasuk penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut, guna memunculkan suatu hipotesis dan menguraikannya dalam kerangka berupa alur penelitian yang akan peneliti lakukan.

Bab III disajikan kerangka gagasan dan teori. Kerangka berpikir dan membuat hipotesis dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV merupakan bagian metode penelitian yang membahas tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, ukuran sampel dan metode pengambilan sampel, populasi, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Dibahas juga definisi operasional variabel penelitian dan metode pengumpulan data operasional. Bab ini menjelaskan cara mengolah data dan cara menggunakan alat analisis yang digunakan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Donaldson dan David (1991) menjelaskan bahwa kepentingan organisasi adalah tujuan utama dari fokus para manajemen atau yang disebut sebagai teori Stewardship. Teori ini menjelaskan hubungan erat dalam kepuasan dan kesuksesan dari organisasi. Teori ini menyatakan bahwa integritas, kejujuran, dan kemampuan pihak manajemen untuk berperan dengan komitmen untuk melakukan tindakan dengan paling efektif untuk memuaskan kepentingan stakeholder. Teori stewardship ini menggambarkan bagaimana manager fokus pada tujuan utama untuk kebutuhan organisasi daripada kepentingan pribadi mereka. Ini juga menjelaskan situasi para manajer tidak memiliki motivasi oleh tujuan individunya sendiri, namun pada mementingkan prinsipal. Di mana teori ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dan kesuksesan sebuah organisasi terkait erat. Jika organisasi berjalan dengan baik, direktur dan manajemen akan dapat memaksimalkan manfaatnya. Dengan demikian, teori stewardship dapat diimplementasikan pada riset mengenai akuntansi sektor publik seperti halnya organisasi pemerintah maupun nonprofit.

Dalam organisasi sektor publik, stewardship theory adalah model yang dapat diterapkan. Penerapan teori stewardship akan penelitian ini ialah pemerintah daerah harus ada selaku lembaga yang dapat dipercaya

yang dapat mewedahi pandangan masyarakat, memberikan public service yang baik, dan dapat melakukan pertanggungjawaban keuangan yang diberikan terhadapnya untuk mencapai prinsip ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori ini, manajer akan lebih memusatkan pada keandalan atau keyakinan publik. Sesuai dengan asumsi teori stewardship, para manajer berupaya membuat keputusan terbaik untuk organisasi dan mengelola sumber daya secara optimal. Mereka juga bekerja berdasarkan pemikiran bahwa bisnis yang kuat secara lembaga dan ekonomi akan memberikan nilai atau kegunaan terhadap pemenuhan kebutuhan kepada steward.

Hubungannya dengan teori stewardship, atau informasi lebih berkualitas, dapat dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memiliki kegunaan bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan pemerintah, serta berfungsi sebagai prinsipal dalam mengevaluasi akuntabilitas serta membentuk kepastian tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik.

Salah satu cara untuk mewujudkan good governance adalah melalui LKPD. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, pemerintah daerah harus mengungkapkan data akuntansi dan informasi lainnya dengan jelas dan rinci. LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah akan membantu banyak orang yang membutuhkan laporan keuangan.

Pihak-pihak tertentu dapat menggunakan LKPD ini untuk membuat keputusan ekonomi.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rakyat memilih kepala daerah. Pemerintah daerah, sebagai manajer, harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori stewardship ini, laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD akan menilai keefektifan program serta kebijakan, yang tergambar dalam pelaksanaan APBD dan impresi LKPD yang diterima oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu instansi dengan periode pelaporan selama satu periode. Tujuan adanya laporan keuangan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan pemerintah, dengan membandingkan realisasi belanja, transfer, pendapatan serta pembiayaan yang telah ditetapkan. Hal ini dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas keuangan dengan mengawasi kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi juga keefektifan suatu dokumen pelaporan dalam menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Asipa (2023) menjelaskan mengenai Kualitas Laporan Keuangan yang merupakan suatu laporan keuangan yang idealnya akurat dan sesuai tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana publik serta laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan informasi terbaik bagi para penggunanya. Sedangkan menurut Hilman (2019) yang menyatakan bahwa Informasi keuangan yang dibuat oleh lembaga untuk bertanggung jawab atas kinerja operasinya, termasuk pengelolaan sumber daya, dan disusun dalam bentuk periode pelaporan tertentu dan dimaksudkan untuk dilaporkan dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Sehingga dapat disimpulkan Kualitas Laporan Keuangan merupakan informasi yang telah disusun secara akurat dan tepat serta transparan yang dirancang dengan pengelolaan yang mudah di pahami sehingga tidak menyesatkan kepada pengguna informasi laporan tersebut. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah beberapa komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan memiliki karakteristik agar dapat berkualitas sesuai aturan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu:

- a. Relevan, informasi keuangan bisa dikatakan sesuai jika laporan yang tertera tersebut memengaruhi ketentuan pengguna dengan membantu mereka agar menilai kejadian lampau atau masa kini,

memperhitungkan masa depan, serta menegaskan dan memperbaiki evaluasi di masa lalu. Kegunaan informasi keuangan yang relevan ialah (1) mempunyai manfaat (*feedback value*) terhadap penggunaannya untuk menegaskan dan memperbaiki harapan mereka sebelumnya. (2) Mempunyai kegunaan prediktif (*predictive value*) yang penggunaannya mampu memperhitungkan kedepannya berdasarkan hasil masa sebelumnya dan kejadian kini. (3) Tepat waktu, sehingga penggunaannya mampu berpengaruh dan sesuai terhadap keputusan. (4) Lengkap, laporan yang disajikan secara lengkap dapat mencakup seluruh informasi keuangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mengindahkan kendala, serta laporan keuangan yang diterbitkan harus secara jelas sehingga dapat mencegah kekeliruan dalam pemanfaatan informasi.

- b. Andal, informasi keuangan yang jujur dan dapat diandalkan, serta bebas dari kesalahan dan kesalahpahaman. Meskipun informasi mungkin bermanfaat, menggunakannya dapat menyesatkan jika tidak dapat diandalkan. Salah satu ciri laporan andal yaitu: (1) Penyajian Jujur: laporan yang menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya disajikan dengan seharusnya. (2) Verifikasi, informasi dalam laporan keuangan dapat diuji; hasilnya tidak berubah jika pengujian dilakukan berulang kali oleh berbagai pihak. (3) Netralitas: laporan digunakan demi kepentingan khalayak ramai serta bukan untuk kepentingan individu.

- c. Dapat dibandingkan, Jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya, informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat. Akan mungkin untuk melakukan perbandingan antara entitas secara internal dan eksternal. Ketika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, perbandingan internal terjadi, dan perbandingan eksternal terjadi ketika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda. Jika suatu entitas pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diumumkan selama periode perubahan tersebut.
- d. Dapat dipahami: Laporan keuangan disajikan dalam bentuk dan istilah yang mudah dipahami oleh pengguna. Akibatnya, pengguna dianggap memahami kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, dan mereka mungkin ingin mempelajarinya.

Adapun tujuan laporan keuangan ialah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dengan pertimbangan faktor ekonomi, social, dan politik ialah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Informasi tentang sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan dan ekonomi, transfer pembiayaan, sisa pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas entitas pelaporan harus diberikan untuk mencapai atau memenuhi tujuan laporan keuangan.

2.1.3 Inventarisasi Aset

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa Aset dibagi menjadi aset lancar dan nonlancar. Aset lancar dianggap jika diharapkan dapat digunakan atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria ini dianggap sebagai aset nonlancar. Pengelolaan aset dikenal sebagai Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang terdiri dari Perencanaan, Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaanm Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaanm serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Penatausahaan terdiri dari tiga bagian ialah Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara. Inventarisasi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah kegiatan pencatatan, pencatatan, serta pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah/Negara. Inventarisasi aset biasa dikenal dengan istilah Sensus Barang Milik Negara. Selain dari pengertian SAP hal ini juga serupa dari pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan menurut Doli D. Siregar menyatakan bahwan kegiatan inventarisasi aset terdiri dari 2 aspek yaitu Inventarisasi Fisik dan lventarisasi yuridis/legal.

Abidin (2020) menyatakan inventarisasi merupakan proses yang diawali dengan penyatuan data, pencatatan, serta publitas keseluruhan asset/barang bersama dengan semua faktor hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset hanya terdiri dari 2 aspek yaitu iventarisasi fisik dan legal dengan dirangkaikan 3 hal kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.

Menurut peraturan Nomor 28 Tahun 2020 pasal 85 yang menyatakan bahwa pengguna barang melakukan iventarisasi barang milik negara paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima tahun), namun ada yang dikecualikan yaitu persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang dilakukan oleh pengguna barang setiap tahunnya.

Kegiatan inventarisasi aset menghasilkan data komplit dan tepat tentang pendapatan daerah yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, atau instansi daerah tertentu. Dalam pelaksanaan inventarisasi aset barang milik negara/daerah memiliki beberapa tujuan ialah untuk memastikan seluruh aset berupa Barang Milik Negara tercatat dan terdaftar secara tepat, mewujudkan tertib administrasi berupa penyediaan data dan informasi atas aset yang dimiliki secara akurat sehingga pengamanan atas aset dapat dipantau secara berkala, untuk mewujudkan transparansi pengelolaan aset barang milik negara dengan mengetahui secara pasti jenis barang; jumlah barang; nilai barang; kondisi barang yang sebenarnya sehingga hal ini juga dapat mengoptimalkan perencanaan pengadaan barang milik negara sehingga dapat efektif dan efisien dalam mengelola anggaran yang ada.

Sehingga adanya inventarisasi secara berkala dan teratur akan mengoptimalkan pengawasan dan pengontrolan aset sehingga tidak terjadinya kehilangan aset maupun pengurangan aset bahkan kelalaian maupun kesengajaan akibat kurangnya pencatatan pada aset. Sehingga adanya hal legal dalam inventarisasi aset akan mencegah kericuhan atas sengketa ataupun pemindahan hak milik yang tidak diketahui.

2.1.4 Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan metode atau skema yang dipergunakan untuk memproses, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi dalam format multimedia dengan bantuan komputer. Ini membuat pengiriman informasi lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama disimpan. Ini adalah hasil dari rekayasa manusia. Wilkinson et al., (2000) menyatakan bahwa teknologi informasi meliputi Komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (seperti internet dan intranet), e-commerce, dan teknologi informasi lainnya.

Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronik adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi juga membantu membuat layanan publik lebih mudah dan lebih murah untuk diakses. Pemerintahan dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, menurut PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan daerah dan menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kecepatan pemrosesan data adalah keuntungan tambahan dari penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu dalam pengolahan dan penyampaian laporan keuangan (Anggraeni, 2014).

Menurut M. Suyanto (2005), alat ukur teknologi informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi, seperti:

- 1) Penggunaan perangkat keras komputer, juga dikenal sebagai hardware, adalah perangkat keras yang digunakan oleh sistem informasi untuk menyimpan file dan item lainnya, menyediakan peralatan, memasukkan dan mengeluarkan terminal, dan menyimpan data.
- 2) Penggunaan perangkat lunak komputer, yang juga dikenal sebagai software, adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung penyebaran data dan informasi, seperti sistem pengoperasian. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sistem, metode, dan aplikasi yang berbasis komputer dikembangkan.
- 3) Jaringan dan komunikasi adalah sistem yang dapat menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang dapat berinteraksi satu sama lain.
- 4) Database: wadah atau file yang berisi program dan data, yang ditunjukkan dengan media penyimpanan fisik selama proses penggunaan sistem.
- 5) Personalia yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi

2.2 Tinjauan Empiris atau Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Elisabeth Emarlin Ruda, Wilhemina Mitan, dan Yoseph Darius P. Rangga (2023)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset Dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Inventarisasi asset, penilaian asset, dan legal audit. Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
Resti Asipa (2023)	Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Inventarisasi asset dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Variable dependen: kualitas laporan keuangan	Secara parsial dan juga secara simultan variable inventarisasi asset tetap dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

	Kabupaten/Kota (Survey Pada Skpd Kabupaten Bandung)		
Febrianita Hadis, Hidayatul Ihsan, Anda Dwiharyadi, Yossi, dan Zalida (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable independent: Pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Variable dependen: kualitas laporan keuangan.	Penggunaan teknologi informasi meningkatkan kualitas laporan keuangan Universitas Andalas di Kota Padang. Ini menunjukkan bahwa ketika teknologi informasi dipasang dengan baik, digunakan dengan benar, dan dirawat dengan baik, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan.
Imas Sukmawati, Endah, dan Suji (2021)	Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Study	Variabel Independen: Inventarisasi Aset Tetap Daerah dan Legal Audit Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Inventarisasi asset memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, Adapun melalui variable intervening legal audit, inventarisasi asset tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

	Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung)		
Faesal Fazlurahman, Nunuy Nur Afiah, dan Ivan Yudianto (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penatausahaan Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening (Studi pada BPKA Kota Bandung)	Variabel Independen: Penggunaan Teknologi Informasi dan SPIP. Variable Intervening: Penatausahaan Aset Tetap Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penggunaan TI secara parsial berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas LKPD. Selanjutnya, penggunaan TI dan SPIP secara parsial dan simultan berdampak positif signifikan terhadap penatausahaan aset tetap. Selain itu, terbukti bahwa penatausahaan aset tetap mampu memediasi secara parsial pengaruh penggunaan TI dan SPIP terhadap kualitas LKPD.
Restika Eklesia Mene, Herman Karamoy, dan	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi	Variable independent: Pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan teknologi informasi dan Penerapana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jessy D.L. Warongan. (2018)	Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	informasi dan system pengendalian intern pemerintah. Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
Novira Juwita Andiani, Dini Wahyu Hapsari, Muhamad Muslih, (2017)	Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara bersamaan. Secara parsial, pembukuan meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan, inventarisasi menurunkan kualitas laporan keuangan secara signifikan, dan SIMAK BMN sama sekali

	Negara DKI Jakarta)		tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Ayang Putri Septiyu Anggraeni (2015)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo secara simultan dan parsial.
Anshari, Efrizal Syofyan (2012)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Inventarisasi BMD, Legal audit, Penilaian BMD, Pengendalian dan pengawasan Barang	Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Legal audit, Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran

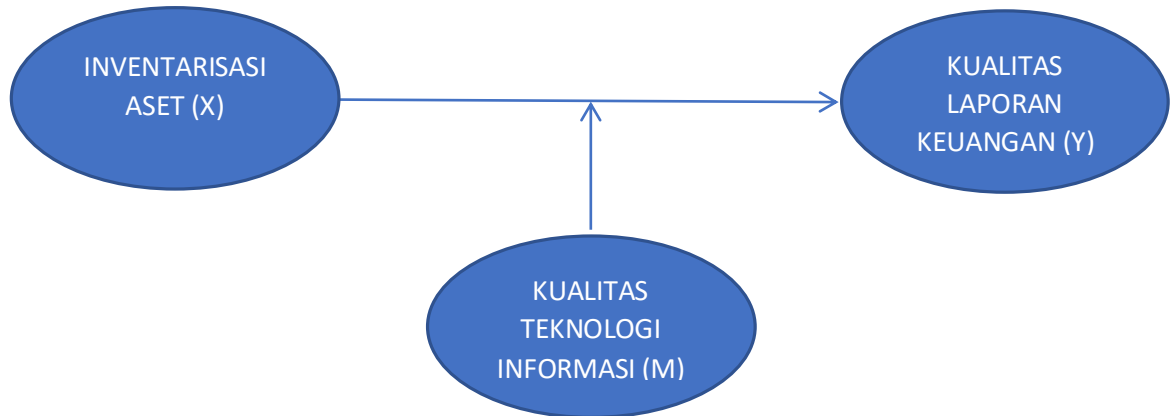
Suatu penelitian perlu dilakukan sebuah kerangka kerja agar penelitian memiliki focus dengan tepat serta relevan dalam pengolahan data untuk menarik kesimpulan. Kerangka pemikiran atau konseptual yang dikembangkan pada pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukans ecara keseluruhan. Pada penelitian ini mencoba untuk menganalisis adanya pengaruh dari salah satu komponen penatausahaan barang daerah yaitu inventarisasi asset terhadap kualitas dari suatu laporan keuangan. Selain itu digunakan variable kontijensi dalam hal ini variable moderasi yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang mampu memperkuat pengaruh inventarisasi asset terhadap kualitas laporan keuangan.

Hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, menurut stewardship theory dalam (Donaldson dan Davis, 1991) menyatakan, manajemen berfokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi daripada tujuan individu. Manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik dalam teori ini. hubungannya dengan laporan keuangan pemerintah daerah dan teori stewardship ialah informasi yang lebih berkualitas. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pemerintahan yang baik dilaksanakan adalah

dengan melaporkan keuangan pemerintah daerah. Manajer pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan pemerintah, yang berfungsi sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan tentang hal-hal ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu dimensi dari kelayakan sebuah laporan keuangan ialah pencatatan inventarisasi asset yang baik serta didukung oleh teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan akan baik.

Kualitas dari sebuah laporan keuangan tidak terlepas dari peran sebuah teknologi yang dimanfaatkan sedemikian rupa agar mampu mempermudah dan mengefisienkan proses pembuatan laporan keuangan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengatur e-government. Pemerintah pusat secara konsisten dan bertahap menggunakan teknologi informasi untuk membantu operasi pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena teknologi informasi membuat proses pertukaran data lebih mudah. Selain itu, tujuan penggunaan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sehingga kerangka pemikiran digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



3.2. Pengembangan Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Inventarisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Karim Abidin (2021) menemukan bahwa pembukuan, inventaris, dan pelaporan baik untuk kualitas laporan keuangan, dan bahwa kualitas teknologi informasi mempengaruhi penatausahaan barang milik daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan Imas Sukmawati (2021) dengan judul Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung) dimana hasil penelitian menemukan secara pembukuan, inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini:

H1: Inventarisasi asset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar

3.2.2 Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kualitas Teknologi Informasi sebagai Variable Moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2021) dengan judul Kualitas Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimana menunjukkan bahwa Kualitas Teknologi Informasi memoderasi inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar. Sedangkan Novita (2017) menyatakan bahwa inventarisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian Hilman (2012) mengenai Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset Dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, inventarisasi aset tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena penelitian ini memiliki inkonsistensi dengan penelitian lainnya, maka penelitian ini menggunakan kualitas teknologi informasi sebagai variable moderasi.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka hipotesis penelitian :

H2: Kualitas Teknologi Informasi dapat memoderasi hubungan Inventarisasi asset terhadap Kualitas Laporan Keuangan.